

**JASA USAHA IRIGASI SAWAH DENGAN SISTEM SUMUR  
SIBEL DI DESA SUMBERTLASEH KECAMATAN DANDER  
KABUPATEN BOJONEGORO PERSPEKTIF AKAD *IJA>RAH*  
DAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD AFIFUDDIN**

**NIM. C92217152**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syari`ah Dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Perdata Islam**  
**Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Surabaya**  
**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

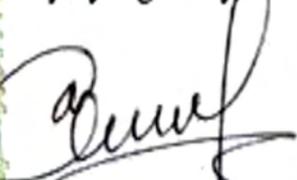
Nama : Muhammad Afifuddin  
NIM : C92217152  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah/Prodi  
Judul Skripsi : Jasa Usaha Irigasi Sawah Dengan Sistem Sumur  
Sibel Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander  
Kabupaten Bojonegoro Perspektif Akad *Ijarah* dan  
Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/Karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juli, 2021

Saya yang menyatakan,



  
Muhammad Afifuddin

NIM. C92217152

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afifuddin NIM. C92217152 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juli 2021  
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sholihuddin', written over the word 'Pembimbing,'.

Muh. Sholihuddin, MHI.  
NIP. 19770725200801109

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afifuddin NIM. C92217152 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Muh. Sholihuddin, MHI.  
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Dr. Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,

Mega Ayu Ningtyas, S.H.I, M.H  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 11 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Afifuddin  
NIM : C92217152  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : afifu7826@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Jasa Usaha Irigasi Sawah Dengan Sistem Sumur Sibel Di Desa Sumbertlasch Kecamatan Dander

Kabupaten Bojonegoro Perspektif Akad *Ijarah* Dan I'atwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX

/2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Agustus 2021

Penulis

(Muhammad Afifuddin)































3. Fatwa DSN No.112/DSN-MUI/IX/2017 yakni fatwa dewan syariah nasional tentang akad *ijarah*.
4. Sumur sibel adalah sumur bor submersibel yang ditanaman dalam tanah, sumur yang mempunyai daya dorong besar untuk menyemburkan air dengan daya yang besar dan digunakan petani untuk membantu mengairi sawah.

Jadi yang dimaksud dengan “Jasa Usaha Irigasi Sawah Dengan Sistem Sumur Sibel Perspektif Akad *Ijārah* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN/MUI/IX/2017 di Desa Sumbertalseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro” adalah jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel menggunakan hukum Islam dianalisis menggunakan akad *ijārah* dan Fatwa DSN No.112/DSN-MUI/IX/2017.

#### **G. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>16</sup> Maka dari itu agar tidak terjadinya pengulangan dalam objek yang sama, perlu pengkajian karya – karya yang telah ada. Diantara penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut.

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

*Pertama*, karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Skripsi yang ditulis oleh Richo Setyonugroho ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan oleh petugas irigasi sawah dengan petani, yang mana para petugas irigasi sawah ini memiliki tugas masing-masing diantaranya pembuka pintu air, petugas pengawas, dan petugas pelaksana. Para petugas irigasi sawah ini mempunyai pekerjaan masing-masing untuk mengatur dan mengawasi prosesnya irigasi sawah. Dari beberapa petugas irigasi sawah tersebut ada yang berprofesi sebagai perangkat desa, uang yang dibayarkan petani sebagai upah irigasi sawah dibayarkan kepada petugas irigasi sawah yaitu perangkat desa maupun orang luar perangkat desa. Permasalahan yang timbul dari skripsi ini adalah kenapa para perangkat desa juga mendapatkan uang tersebut karena perangkat desa sendiri sudah di gaji oleh negara mengapa harus meminta uang dari pengelolaan irigasi sawah tersebut. Maka dari permasalahan tersebut agar adanya kejelasan hukum dari proses bermuamalah yang baik dan benar.<sup>17</sup>

*Kedua*, karya ilmiah berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”. Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Ciptanila Yuni K mengangkat permasalahan tentang upah irigasi sawah yang

---

<sup>17</sup> Richo Setyonugroho, “Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. (skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016).

dibayarkan setiap panen. Kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani dengan petani yang mana kelompok tani ini dari pemerintahan desa dan yang bekerja dilapangan ada petugas irigasi sawah yang tergabung dalam kelompok HIPAM. Permasalahan yang diangkat adanya penarikan uang tambahan yang dilakukan oleh petugas irigasi sawah yang mana ada biaya uang tambahan yang dibayarkan petani kepada petugas irigasi sawah saat setiap panen.<sup>18</sup>

*Ketiga*, karya ilmiah berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Dengan Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi ini ditulis oleh Siti Machmudah yang membahas kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap menggunakan bagi hasil yang disertai dengan upah. Kerjasama ini sudah terjadi secara turun temurun, upah yang disepakati diawal berupa sebagian dari hasil panen namun berjalanya waktu berubah menjadi uang untuk upahnya. Kerjasama ini menggunakan akad *muzara'ah* dan dalam kerjasama ini ada salah satu pihak yang dirugikan.<sup>19</sup>

Sedangkan persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang sudah dijelaskan diatas yaitu: (1) skripsi dari Richo Setyonugroho dan Kusnul Ciptanila Yuni K dengan skripsi ini terlihat dalam akadnya

---

<sup>18</sup> Kusnul Ciptanila Yuni K, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”. (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>19</sup> Siti Machmudah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Dengan Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. (Skripsi-- Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

menggunakan akad *ijārah* sedangkan untuk skripsi Mahmudah menggunakan akad *muzara'ah* (2) permasalahan yang diangkat skripsi diatas dalam skripsi Richo Setyonugroho membahas pembayaran upah yang dibayarkan petani kepada petugas irigasi sawah yang mana petugas irigasi sawah tersebut juga berprofesi sebagai perangkat desa, padahal perangkat desa sudah dibayar oleh negara mengapa masih menarik upah kepada petani. Skripsi Kusnul Ciptania Yuni K mengangkat permasalahan penarikan uang tambahan petugas irigasi sawah kepada petani, petani merasa penarikan uang tersebut melanggar perjanjian diawal yang telah disepakati perihal penarikan upah. Skripsi Siti Machmudah mengangkat permasalahan dari perubahan pembayaran upah yang berupa hasil panen berubah menjadi uang dari perubahan tersebut salah satu yang berkerjasama merasa ada yang dirugikan. Sedangkan untuk skripsi ini mengangkat permasalahan dari besaran prosentase pembayaran upah yang dinilai terlalu besar tidak sebanding dengan kinerjanya dan pemenuhan manfaat dari akad yang tidak didapat secara penuh yang mengakibatkan petani dirugikan.

Skripsi ini lebih fokus dalam dua hal yaitu: (1) bagaimana praktik jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertalseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro?; (2) bagaimana perspektif akad *ijārah* dan fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur *sibel* di desa Sumbertalseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro?.





Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.

- 1) Widjatmoko dan Imam Soewadi, *Irigasi*, 2001.
- 2) Mohammad Bagus Ansori, Edijatno, dan Soekibat Roedy Soesanto, *Irigasi dan Bangunan Air*, 2018.
- 3) Herman Supriadi dan Rudy Sunarja Rivai, *Pengembangan Investasi Irigasi Kecil Untuk Peningkatkan Produksi Padi Mendukung Swasembada Beras*, 2018.
- 4) Jannata, Sirajuddin Haji Abdallah, Asih Priyati, *Analisa Kinerja Pengelolaan Irigasi Di Daerah Irigasi Lemor, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat*, 2015.
- 5) Mohammad Rodhi, Yasuhiro Mori, Takumi Kondo, *Sistem Lelang dan Sistem Swakelola dalam Manajemen Irigasi di Tingkat Jaringan Tersier*, 2015.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.
- 7) Dan sumber sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian.









macam *ijārah*, sifat *ijārah* dan hukumnya, kewajiban *Mujir* (orang yang menyewakan) dan *Mustajir* (penyewa), prinsip *ujrah* (upah), Berakhirnya akad *Ijārah*, serta Fatwa DSN MUI NO.112/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

BAB III Data Penelitian, meliputi Perkembangan irigasi sawah di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro, dan Praktik Jasa Usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel.

BAB IV Analisis Data, meliputi praktik upah usaha irigasi sawah dengan sistem sumur *sibel* di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro dan perpektif akad *ijārah* dan Fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap jasa usaha irigasi sawah di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

BAB V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian dan selanjunya memberikan saran.













- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya penyewaan rental mobil yang mana jika penyewa menyewa mobil selama tiga hari maka selama tiga hari itu tidak boleh disewakan untuk orang lain harus sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran).







- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan. Misalnya memperbaiki motor yang disewakan yang mana harus mempersiapkan untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan. Melengkapi rumah yang disewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.
- b. Penyewa ketika selesai menggunakan barang maupun jasa yang di sewa wajib bertanggung jawab atas semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana kita menyewanya. Maksudnya adalah penyewa wajib bertanggung jawab jika objek yang disewa mengalami kerusakan atau cacat yang objek sewa tersebut rusaknya berasal dari penyewa itu sendiri, dan kemudian harus mengembalikan objek yang di sewa dalam keadaan semula atau utuh, seperti diawal ia menyewa.
- c. Masing-masing penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka dalam hal ini penyewa boleh membatalkan akad perjanjian sewa.
- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada orang penyewa dan memberinya keleluasaan















- e. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.
- f. *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat *dalam ijārah 'ala al-a'yan*.
- g. *Ijārah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
- h. *Ijārah 'ala al-asykhash/ijārah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
- i. *Ijārah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirnya akad *ijārah*.
- j. *Ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (*manfaat 'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- k. *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
- l. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atau suatu jasa.
- m. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.



- b. *Mu'jir, Musta'jir, dan Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
  - d. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
  - e. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.
  - f. *Ajir* wajib mempunyai kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.
- Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijārah 'ala al-A'yun*
- a. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
  - b. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam huruf a, harus dapat di serah terimakan (*maqdar al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati akad *ijārah maushufah fi al-dzimmah*.
- Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa
- a. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah.













yang ingin menyewakan dengan jangka pembayaran satu tahun untuk menyewa. Desa Sumbertlaseh tepatnya juga menggunakan air Bengawan Solo untuk irigasi sawah, tepatnya dusun Balongsumber yang tepatnya sebelah utara. Kepala dusun menyewa diesel untuk pengirigasian lahan persawahan namun berjalannya waktu kepala dusun tidak mampu bekerja secara maksimal dan pembayaran sewa diesel yang dianggap kurang tepat waktu pembayaran. Maka pemilik diesel memutuskan untuk penyewaan tidak dilanjutkan karena pembayaran uang sewa yang selalu telat.

Mulai lah ditahun 2016 kepala dusun memutuskan untuk membuat sumur bor atau yang dikenal sekarang dengan sebutan sumur sibel. Sumur sibel merupakan sumur tanah yang mana sumur ini mengambil air tanah dengan kedalaman tertentu. Untuk pemanfaatan air tanah ini sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Untuk pembuatan sumur bor ini untuk daerah perkotaan seperti kota-kota besar seperti Jakarta harus mengurus perizinan terlebih dahulu untuk pengeboran agar pemanfaatan air tanah tidak merusak lingkungan dan sesuai kebutuhan.

Pembuatan sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dande kabupaten Bojonegoro tidak mengurus perizinan terlebih dahulu namun langsung membuat karena pengetahuan akan ilmu masih dianggap biasa dan mereka beranggapan pengambilan air tanah ini kan masih ditanah mereka jadi mereka leluasa untuk membuat sumur sibel tersebut. Beda

















Secara praktik jasa usaha irigasi sawah ini yang menjadi pelaku dalam melaksanakan akad ijārah adalah pengelola sumur sibel dan petani di desa Sumbertlaseh. Air sumur sangat penting bagi para petani untuk kebutuhan tanaman padi mereka karena air sumur sumber utama yang sekarang dibutuhkan untuk mengairi sawah dibandingkan air dari aliran waduk dan sungai bengawan solo. Dalam pelaksanaan akad ini kedua belah pihak si pengelola sumur dan petani tidak ada paksaan karena petani sangat membutuhkan air dan demi keberlangsungan tanaman mereka.

Sighat atau ijab qabul, ijab merupakan kesepakatan yang diucapkan dari salah satu pihak untuk melakukan perjanjian sebagai tujuan dari akad yang akan dijalankan, sedangkan qabul merupakan perkataan yang keluar dari pihak yang berakad setelah mengucapkan ijab. Ijab dan qabul ini merupakan tanda adanya kerelaan satu sama lain atau suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam praktiknya, untuk mengairi sawah para petani sebelum melakukan penanaman mereka memberitahu secara lisan ke pengelola sumur untuk mengairi sawah mereka. Akad perjanjian ini berlangsung secara fleksibel yang mana petani memberitahu si pengelola suur tidak hanya disat dirumah tetapi bisa di sawah, warung, atau pun disaat berpapasan secara langsung dijalan dan berlangsung secara luwes tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pengirigasian sawah di desa Sumbertlaseh dilaksanakan pada musim kemarau dan penghujan, beda halnya sebelum adanya sumur sibel ini petani hanya bergantung pada tadah hujan, aliran sungai yang kurang maksimal untuk pengairan sawah setelah adanya sumur sibel ini petani lebih tenang karena kebutuhan air untuk sawah mereka terpenuhi. Walaupun pernah pengelola sumur telat untuk mengairi sawah mereka. Pembayaran upah yang disepakati diawal sebesar 20% persen yang harus dibayarkan petani ke pengelola sumur, dalam salah satu wawancara narasumber memberikan gambaran untuk besaran upah yang dibayarkan. Jika besok ada yang panen maka petani akan menghubungi pengelola sumur kalau lahan sawahnya besok akan di panen dan setelah dipanen petani akan menanyakan untuk besaran upah irigasi sawah tersebut. Pengelola sumur memberitahu petani bahwasannya hasil mendapatkan 1500 kilo atau 1,5 ton untuk upah yang dibayarkan sebesar 20% untuk upah irigasi sawah.

Dilihat dari percakapan diatas besaran upah yang telah di sepakati oleh pihak petani dan pengelola sumur dengan penjelasan sebagai berikut, kebanyakan para petani menjual gabahnya ke tengkulak, jika gabah itu dijual langsung ke tengkulak maka berat gabah akan dikurangi karung yang diperoleh dan satu karung dihitung 1kg dengan contoh diatas dalam sekali panen sepetak sawah memperoleh berat gabah 1500 Kilo dan harga pasar sebesar 3.800 rupiah dan jumlah karung sebanyak 40 karung dengan perhitungan sebagai berikut:

Jadi untuk pembayaran upah yang dibayarkan sebesar Rp1.109.600 dari hasil penjualan gabah mendapatkan Rp5.548.000 ini dibayarkan setelah petani mendapatkan uang dari tengkulak dan proses perhitungan ini dilakukan oleh pengelola sumur dan untuk bukti perhitungan (nota) akan diberikan kepada petani sebagai pegangan untuk pembayaran upah irigasi.

Petugas pengelola sumur memiliki beberapa tugas saat proses mengairi air sumur ke lahan persawahan para petani dengan tugas menata selang untuk laju air ke sawah yang mau di aliri, menutup parit – parit agar air tidak melebur ke lahan persawahan yang belum waktunya dialiri air, dan mengurai debit air agar sesuai dengan kebutuhan lahan. Dari kerja yang dilakukan oleh petugas pengelola sumur petani mendapatkan manfaat berupa jasa yang dilakukan oleh petugas pengelola sumur, maka dari itu petani wajib membayarkan upah atau jasa yang telah dilakukan oleh petugas pengelola sumur.

Dengan penjelasan diatas akad yang disepakati para pihak telah sesuai dengan unsur-unsur akad berikut ini:

1. Dilihat dari segi dua pelaku akad, yang menjadi pihak dalam perjanjian akad kerjasama irigasi sawah dengan sistem sumur sibel adalah pihak petani yang menjadi pihak pertama (penyewa) dan pengelola sumur menjadi pihak kedua (pemilik sewa);

2. Dilihat dari segi sughatnya atau ijab qabul, maka yang menjadi sughatnya dari kerjasama ini adalah berbentuk ucapan yakni pihak petani yang meminta pengelola sumur dengan sistem sumur sibel dan pihak petugas pengelola sumur yang menerima ucapan tersebut;
3. Dilihat dari segi objek akad, maka yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama adalah irigasi sawah dengan sistem sumur sibel.
4. Dilihat dari segi tujuan akad, yang menjadi tujuan dalam perjanjian kerjasama ini adanya harapan saling menguntungkan dari jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel dan mempunyai manfaat teruntuk dari pihak petani dan pengelola sumur.
5. Apabila dilihat dari segi upah, akhir dari kerjasama ini adalah pembayaran jasa berupa pemberian upah yang dibayarkan oleh petani sebesar 20% kepada pengelola sumur yang mana upah tersebut nantinya oleh pengelola sumur akan dibayarkan kepada petugas pengelola sumur dan sisannya untuk pemeliharaan alat sumur sibel dan pembelian token listrik.

Dilihat dari semua rukun dan syarat akad irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro sudah terpenuhi semua. Walaupun ada kendala saat proses irigasi sawah yaitu adanya keterlambatan pengelola sumur dan petugas pengelola sumur untuk mengairi sawah para petani. Penulis berpendapat bahwa praktik irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro belum sesuai

dengan rukun dan syarat akad *ijārah* dikarenakan manfaat yang didapat petani belum maksimal dengan kinerja dari pengelola sumur.

**B. Perspektif Akad *Ijārah* dan fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Jasa Usaha Irigasi Sawah dengan Sistem Sumur Sibel di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro**

Jasa usaha irigasi sawah menggunakan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh sudah berlangsung sejak tahun 2016 menggunakan kesepakatan akad *ijārah* yang telah disepakati bersama antara pengelola sumur dan petani. Dalam akad *ijārah* pengelola sumur sebagai "*mu'jir*", petani sebagai "*musta'jir*", sedangkan upah yang dibayarkan atas manfaat yang diperoleh dari jasa yang diberikan disebut dengan "*ujrah*".

Dilihat dari perspektif akad *ijārah* kejasama yang sudah berlangsung ini ada kendala dalam hal perolehan manfaat dari petani untuk irigasi sawah mereka. Petani mengeluhkan jika air yang di salurkan ke sawah mereka kurang maksimal yang mengakibatkan kurang baik hasil panen mereka. Dilihat dari beberapa poin dalam akad *ijārah* dari segi perolehan manfaat dari jasa yang diberikan sudah sesuai belum dengan ketentuan akad *ijārah*.

Pengelola sumur dan petugas pengelola sumur bekerjasama untuk mengairi lahan pertanian petani yang pengirigasian dilaksanakan selama musim tanam sampai panen yang telah disepakati bersama. Pengelola sumur sebagai pemilik sumur menyuruh petugas pengelola sumur untuk mengairi lahan persawahan yang dimulai dari lahan yang ingin dialiri air



Disatu sisi petani merasa keberatan akan upah yang dibayarkan kepada pengelola sumur karena terhitung mulai tahun 2018 kinerja pengelola sumur kurang memuaskan karena kurangnya air yang disalurkan ke sawah petani yang mengakibatkan hasil panen yang menurun. Dilihat dari perpektif akad *ijārah* ada beberapa poin yang mengakibatkan rusaknya akad *ijārah* khususnya dalam manfaat yang diperoleh petani diantaranya:

1. Dilihat dari sifat *ijārah* bahwasanya akad *ijārah* tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sifat akad *ijārah* akan rusak jika adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Dari pemaparan tersebut petani tidak mendapatkan manfaat penuh dari irigasi saah tersebut yang mengakibatkan para petani kurang setuju jika upah yang ditarik sebesar 20% karena tidak sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh pengelola sumur.
2. Dari segi hukum akad *Ijārah*, *ijārah* termasuk dalam bagian jual beli pertukaran, hanya saja dengan pengambilan kemanfaatan yang mana kemanfaatan ini sendiri sudah ditetapkan bagi penyewa dan orang yang menyewakan yakni petani dan pengelola sumur. Jika kemanfaatan tidak dapat terpenuhi bisa merusak hukum akad *ijārah* sendiri. Dari awal perjanjian kesepatan bersama telah dilakukan oleh petani dan pengelola sumur namun diakhir kerjasama saat panen hasil yang didapat kurang memuaskan karena manfaat dari jasa yang

ditawarkan kurang berhasil mengakibatkan petani kurang memperoleh manfaat dari kerjasama ini.

3. Dari segi kewajiban penyewa dan orang yang menyewakan, pengelola sumur sebagai orang yang menyewakan seharusnya berusaha keras agar kebutuhan petani tercukupi untuk mengirigasi lahan persawahan, apabila pengelola sumur tidak memberikan manfaat secara utuh seharusnya para petani tidak memberikan upah secara utuh juga agar semua pihak merasakan satu sama lain agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

Dari pemaparan diatas bahwasanya pengelola sumur belum maksimal dalam mengirigasi lahan persawahan milik petani yang mengakibatkan hasil pertanian kurang bagus karena kurangnya air untuk kesuburan tanaman. Manfaat dari jasa usaha irigasi sawah belum sempurna manfaat yang dirasakan oleh petani sedangkan pengelola sumur meminta upah sesuai kesepakatan sebesar 20% tanpa ada musyawarah terlebih dahulu karena kurangnya kinerja dari pengelola sumur.

Ketentuan terkait ujarah yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan harus sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan, dengan isi sebagai berikut:

1. *Ujarah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah, dalam permasalahan yang berlangsung ujarah yang dibayarkan petani kepada pengelola sumur

berupa uang maupun gabah yang pembayarannya sudah kesepakatan diawal antara petani dan pengelola sumur. Manfaat yang diperoleh petani berupa hasil panen yang diperoleh yang sesuai dengan harapan, walaupun setiap panen pastinya hasil tidak bisa ditebak karena yang awalnya tanaman sehat saja namun saat akan di panen terkena hama.

2. *Ujrah* harus jelas kadar pembayarannya, *ujrah* yang dibayarkan bisa berupa prosentase yang telah disepakati oleh para pihak yang berakad. Pembayaran upah yang telah disepakati oleh petani dan pengelola sumur berupa prosentase sebesar 20% yang mana prosentase ini telah disepakati diawal oleh petani dan pengelola sumur, yang menentukan jumlah besaran prosentase dari pihak pengelola sumur dan petani menerima tersebut. Prosentase tersebut yang dibayarkan petani nantinya digunakan untuk membayar petugas pengelola sumur dan untuk perawatan sumur sibel. Untuk perhitungan pembayaran upah menggunakan rumus sebagai berikut:  $(\text{Berat Gabah} - \text{Jumlah Karung}) - \text{Harga Gabah} \times \text{Besaran Upah}$ .
3. *Ujrah* yang dibayarkan secara tunai, bertahap, dan tangguh berdasarkan kesepakatan bersama. Pembayaran upah yang telah disepakati oleh petani dan pengelola sumur secara tunai yang mana petani saat hasil panen sudah ditimbang oleh tengkulak nantinya petani mendapatkan nota dari petugas pengelola sumur nantinya nota tersebut diantarkan kepada petani dan petani nantinya mendapatkan

uang dari hasil penjualan gabah. setelah itu, petani membayarkan upah air kepada petugas pengelola sumur, dengan membawa nota sebagai bukti pembayaran yang sah. Namun pembayaran upah yang disepakati bersama antara petani dan pengelola sumur berupa uang tunai dan hasil panen yang sudah sesuai dengan prosentase upah sebesar 20%.

4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan. Pembayaran upah yang dibayarkan petani terhadap pengelola sumur memang sudah menjadi kesepakatan bersama namun setelah dua tahun terakhir mulai tahun 2018 petani mengeluhkan upah yang dibayarkan. Seharusnya pembayaran upah harus ditinjau ulang karena petani merasa keberatan untuk pembayaran upah sebesar 20% dikarenakan pengelola sumur belum mampu mengairi lahan persawahan secara maksimal yang mengakibatkan petani ada yang mangirigasi lahan mereka sendiri menggunakan diesel, membeli token listrik sumur sibel menggunakan uang pribadi namun tidak jelas pembagian upah yang dibayarkan. Seharunya pengelola sumur mengadakan musyawarah antar petani untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Ketentuan bagi *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir* yang harus dijalankan bagi mereka saat melaksanakan akad *ijārah* dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017. Akad *ijārah* dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, dalam akad kerjasama ini yang

melakukan akad *ijārah* si petani dan pengelola sumur. *Mu'jir*, *musta'jir* dan *ajir* harus cakap hukum yang mana mereka harus mampu membedakan antara yang benar dan salah, harus sesuai aturan dalam berkerjasama. Kerjasama kedua belah pihak anatar petani dan pengelola sumur bahwasanya mereka mengetahui perjanjian kerjasama yang sedang di jalankan dalam akad *ijārah* dalam hal irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertlaseh kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

*Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*, pengelola sumur mempunyai kewenangan untuk mengairi lahan persawahan milik petani sesuai kebutuhan pertanian. Pengelola sumur sebagai pemilik sumur sibel ini harus mengetahui wilayah yang harus diirigasi.

*Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat, pengelola sumur harus mampu menyerahkan manfaat terhadap parapetani agar apa yang sudah dikerjasamakan sesuai dengan manfaat yang diinginkan para petani. Namun, pengelola sumur selama dua tahun ini kinerjanya mulai menurun yang mengakibatkan petani tidak mendapatkan manfaat dari pengelola sumur dalam akad kerjasama jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel ini. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar upah, petani tepat waktu untuk membayar upah kepada pengelola sumur, namun disayangkan dari petani

hanya pembayaran upah yang harus dimusyawarahkan kembali agar sesuai dengan kinerja mereka dan upah yang di bayarkan tidak terlalu memberatkan salah satu pihak yaitu dari petani.

*Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya. Pengelola sebagai pihak *Ajir* seharusnya mampu memberikan layanan jasa irigasi sawah ini secara profesional terhadap petani agar mereka juga bisa merasakan hasil yang sesuai dengan akad yang kerjasamakan. Disayangkan pengelola seolah-olah lepas kendali untuk permasalahan pembayaran upah ini karena tanpa disadari permasalahan ini mengandung ketidakadilan terhadap petani.

Menurut pandangan penulis dalam segi ketentuan pembayaran ujah, ketentuan tentang kewajiban bagi (*mu'jir*, *musta'jir*, dan *ajir*), segi sifat akad *ijārah*, hukum akad *ijārah* dan kewajiban *mu'jir* dan *musta'jir*. Mulai dari bentuk kerjasama dan praktik dilapangan dalam proses berlangsungnya akad ini sudah sesuai namun dalam segi manfaat dan pembayaran ujah seharusnya di musyawarahkan kembali agar semua pihak mampu memberikan aspirasinya agar kerjasama ini tetap berlangsung agar tidak ada perbuatan-perbuatan yang memaksakan dalam memenuhi jasa usaha irigasi sawah dengan sistem sumur sibel di desa Sumbertalseh ini.

Sehingga dengan adanya musyawarah ini timbul kerelaan antara kedua belah pihak yaitu petani dan pengelola sumur perihal prosentase









